

Judul : Visa ilegal ganggu hak jemaah haji
Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Arab Pulangkan 34 WNI Visa Ilegal Ganggu Hak Jemaah Haji

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzily menyatakan dukungannya terhadap tindakan Pemerintah Arab Saudi yang memulangkan 34 dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) karena menggunakan visa palsu untuk berhaji. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari aturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi terkait penggunaan visa haji.

"Kami mendukung kebijakan tersebut karena haji hanya bisa diikuti oleh WNI yang memiliki visa haji resmi, baik itu visa regular, haji khusus, maupun visa Furoda. Penggunaan visa di luar ketentuan ini adalah ilegal dan berdampak negatif pada penyelenggaraan ibadah haji yang terkoordinasi dengan baik," ujar Ace di Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, jemaah haji yang tidak terdaftar secara resmi dapat mengganggu hak-hak jemaah haji reguler. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan aturan ketat mengenai akomodasi, tenda, dan makanan bagi jemaah haji yang terdaftar. Kehadiran jemaah dengan visa palsu dapat mengancam hak-hak jemaah yang telah membayar secara resmi.

"Dikhawatirkan jemaah haji tidak resmi akan mengambil hak-hak jemaah haji Indonesia yang reguler saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujarnya.

Ace juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan penyelenggaraan ibadah haji dengan visa tidak resmi. "Masyarakat harus hati-hati dan memastikan visa yang digunakan adalah visa haji yang resmi," tutupnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji. Salah satunya soal kewenangan dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan.

Menurutnya, kesehatan tidak cukup menentukan apakah seseorang layak atau tidak untuk berangkat haji, tetapi dokter juga harus mempertimbangkan kondisi istitha'ah calon jemaah. Pengertian istitha'ah adalah kondisi di mana seseorang memiliki persiapan finansial, pengetahuan tentang tata cara haji, kesehatan fisik dan mental yang memadai, serta sikap hati yang ikhlas.

"Menurut saya istitha'ah ini termasuk hal yang penting juga untuk memastikan bahwa calon jemaah memiliki kemampuan dan kesiapan yang

cukup untuk menjalani ibadah haji dengan baik," ucap politisi F-PKB ini.

Dia mengungkapkan, perlunya kejujuran dari tenaga medis dalam memeriksa kesehatan dari calon jemaah haji. Pasalnya, ada salah satu jemaah haji yang sudah lolos Istitha'ah kesehatan pada tahap awal, tetapi setelah diperiksa dari segi kesehatan tidak layak, bahkan belum vaksin.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan dalam bentuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan calon jemaah haji. Dalam proses persiapan haji yang relatif singkat, yakni 24 jam dari kedatangan hingga penempatan di kamar masing-masing, penting bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai guna memastikan kesehatan dan kenyamanan calon jemaah. ■ KAL